

**jesp**

ISSN 2086-1575  
Vol. 4, No. 2, Nopember 2012

*Jurnal* **Ekonomi &  
Studi Pembangunan**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**um**  
The Learning  
University

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) terbit dua kali setahun memuat artikel hasil pemikiran filosofis, konseptual, teoritis, telaah kritis (*critical review*), dan penelitian di bidang ekonomi pembangunan (*development economics*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*).

**Ketua Penyunting**

Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si

**Wakil Ketua Penyunting**

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

**Penyunting Pelaksana**

Dr. Mit Witjaksono, MS.Ed

Dr. Sugeng Hadi Utomo, M.S

Dr. M. Nasikh, SE, M.P., M.Pd

Grisvia Agustin, SE., M.Sc

**Pelaksana Administrasi**

Tutut Boedyo Wibowo, S.Kom, MT

Januar Kustiandi, S.Pd., M.Pd

**Alamat Redaksi/TU**

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM)

Jl. Semarang 5. Malang 65145. Gedung E3 Lantai 2

Tlp/Fax (0341) 585-911

E-mail: ekonomi\_um@yahoo.com, mitrojoyo@gmail.com, imm\_mkl@yahoo.com

Site: [www.fe.um.ac.id](http://www.fe.um.ac.id)

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) dikelola oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM).

Dekan: Prof. Dr. Budi Eko Soecipto, M.Ed.

Pembantu Dekan I: Dr. Mit Witjaksono, MS.Ed.

Pembantu Dekan II: Dr. Tuhardjo, SE., M.Si.Ak.

Pembantu Dekan III: Drs. Djoko Dwi Kusumayanto, M.Si.

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan: Dr. Hari Wahyono, M.Pd.

Naskah artikel yang disumbangkan kepada **JESP** harus mengikuti aturan dalam *Petunjuk bagi Kontributor JESP* yang dilampirkan pada setiap nomor penerbitan.

Isi artikel beserta akibat yang ditimbulkan oleh artikel itu menjadi tanggungjawab penuh penulisnya (kontributor).



## EDITORIAL

---

### Pengantar

Seperti pada pengantar edisi perdana, *JESP* (baca: *jès pé*) memuat karya tulis:

1. Artikel pemikiran filosofis, teoritis, konseptual, atau telaah kritis (*critical reviews*), yang selanjutnya diberi label kelompok: **ARTIKEL**.
2. Artikel hasil penelitian, yang selanjutnya diberi label kelompok: **PENELITIAN**.
3. Artikel tinjauan buku (*book review*), yang diberi label kelompok: **TINJAUAN BUKU**.

Artikel dalam kelompok 1 memaparkan pemikiran konseptual, telaah kritis, atau analisis kontekstual tentang teori ekonomi, pemikiran, paradigma, atau filsafat ekonomi, dan aplikasinya dalam ekonomi pembangunan.

Artikel dalam kelompok 2 memaparkan hasil kajian (penelitian) empiris tentang penerapan lapangan, atau simulasi lab (ekonomi eksperimental) terhadap isu, kasus, atau implementasi kebijakan ekonomi.

Artikel dalam kelompok 3 *menelaah isi, cakupan, manfaat, dan kritik* buku yang dipandang penting dalam kajian *ekonomi dan studi pembangunan*.

Dalam edisi ini dapat dihasilkan 1 artikel konseptual, 9 hasil penelitian empiris dan 1 tinjauan buku.

Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusinya, dan rekan-rekan "Penyunting Pelaksana", "Pelaksana Administrasi", serta semua pihak yang telah membantu mewujudkan penerbitan jurnal ini, tak lupa kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi.

## Tentang Nomor Ini

Pada edisi nomor 2 tahun 2012 ini diwarnai dengan berbagai pemikiran dan kajian empiris tentang berbagai dimensi dalam pembangunan dalam konstelasi perekonomian regional, nasional dan global. Bagian pertama dalam jurnal ini diawali dengan hasil karya pemikiran teoretis dan konseptual. Dalam konteks perekonomian nasional di bidang Ekonomi Moneter, tulisan dari saudara Sasli R mengingatkan kembali akan pentingnya mereformulasikan kembali perekonomian nasional dalam perspektif syariah. Implementasi ekonomi moneter pada dasarnya telah banyak dikaji dalam literatur perekonomian syariah melalui berbagai kajian dan pendapat yang sudah ada.

Bagian kedua dari jurnal edisi ini berisikan hasil kajian empiris tentang dinamika dan problematika pembangunan. Dalam kajian empiris ini banyak dikupas berbagai hasil penelitian. Dalam konteks internasional, tulisan dari saudara Timbul H.S memaparkan secara analisis tentang pepajakan di negara-negara ASEAN. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, persentase penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia masih lebih kecil. Hal ini mengindikasikan masih adanya potensi penerimaan pajak yang dapat digali dalam perekonomian nasional. Dalam konteks perekonomian secara makro, tulisan dari Imam M mencermati kembali peran FDI dalam perekonomian nasional. Secara empiris walaupun aliaran di Indonesia berfluktuatif, namun masih tetap memberikan kontribusi riil terhadap PDB Indonesia. Tulisan Wasito R.J menganalisis sebuah dilema dalam perkembangan pasar tradisional dan liberalisasi ritel modern. Menurutnya pasar tradisional memiliki sejarah penting dalam membangun bangsa, sehingga dibutuhkan usaha keras agar tetap eksis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam paparan hasil penelitian yang lain, tulisan Asfi M menganalisis sebuah pola pembiayaan Agribisnis dan peran bank pada kontrak usaha tani jagung. Dengan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, tulisan ini berusaha untuk mencermati sebuah informasi kunci bahwa pola pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan melalui perusahaan kepada petani selama ini menimbulkan informasi yang tidak simetris. Sedangkan dalam konteks regional tulisan Abdul A, dkk menganalisis potensi perekonomian daerah di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Melalui analisisnya tersebut dihasilkan sebuah pemetaan terhadap potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan secara sektoral di Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Bagian akhir dari tulisan ini adalah sebuah hasil resensi buku tentang ekonomi pegadaian syariah. Pada edisi ini, hasil resensi disampaikan oleh Subagyo tentang buku yang berjudul **Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)**. Buku tersebut merupakan hasil dari telaah kritis secara teoretis dan empiris tentang pegadaian syariah yang ditulis oleh Sasli Rais seorang praktisi dan akademisi yang banyak menggeluti bidang kebijakan pembangunan dan ekonomi syariah.

Pada akhirnya semangat yang dibangun oleh tim JESP pada edisi 2 tahun 2012 ini semoga memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang madani dan berkeadilan sosial.

Malang, 31 Nopember 2012  
Penyunting

## DAFTAR ISI

---

**EDITORIAL**

Pengantar	171
Tentang Nomor Ini	172

---

**ARTIKEL**

Ekonomi Moneter : Tinjauan Sejarah Ekonomi Islam <i>Sasli Rais</i>	175
---	-----

---

**PENELITIAN**

Penerimaan Perpajakan di Negara Asean ✓ <i>Timbul Hamonangan Simanjutak</i>	181
Aliran <i>Foreign Direct Investment</i> dan Produk Domestik Bruto Di Indonesia <i>Imam Mukhlis</i>	191
Pengaruh Jumlah Uang Beredar ( JUB ), Tingkat Suku Bunga BI Rate, Dan nilai Tukar Rupiah Dollar – AS Terhadap Laju Inflasi di Indonesia ( Tahun 2007 – 2011 ) <i>Yuniar Ardila &amp; Sapir</i>	201
Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> ( CAR ), <i>Return On Asset</i> ( ROA ) dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> ( LDR ) Terhadap Harga Saham Bank Pemerintah di Indonesia Periode 2004-2011 <i>Ferik Vidyatama &amp; Mardhono</i>	213
Dilema Ekonomi : Pasar Tradisional <i>Versus</i> Liberalisasi Bisnis Ritel di Indonesia <i>Wasisto Raharjo Jati</i>	223
Dampak Investasi Pemerintah Terhadap Investasi Swasta dan Kesejahteraan Masyarakat Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku <i>Tri Wahyuningsih</i>	243
Perencanaan Energi Daerah Provinsi Maluku Utara <i>Agus Sugiyono</i>	261
Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Temate <i>Amran Husen</i>	273

Telaah Kritis Pola Pembiayaan Agribisnis Pada Kontak Usaha Tani  
(Studi Pada Kontrak Usaha Tani Jagung)  
*Asfi Manzilati & Yenny Kornitasari* 285

Analisis Sektor Unggulan dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lamongan  
(Sebuah Pendekatan Sektoral Pembentuk PDRB)  
*Abdul Azis, Arvidya Maulid Dana, Endro Pebi Trilaksono,  
Fajar Try Leksono & Wildan Mudhoffar* 299

---

#### **TINJAUAN BUKU**

**Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)**  
*Subagyo* 311

---

## Penerimaan Perpajakan di Negara Asean

Timbul Hamonangan Simanjutak

### *Abstract*

*This paper aims to analyze the progress of tax revenue in Asean Countries; Indonesia, Malaysia, Thailand and Philipine from 1990 until 2009. The method of analysis is descriptive statistic. The result of analysis shows that tax revenue in Asean countries have similar pattern. The external shocks give the contagion effect to economic progress among four Asean countries. Although, this research also find that tax ratio in Thailand has higher rate than in Malaysia, Philipine and Indonesia. Therefore, each country in Asean may anticipate the external shocks by appropriate tax policy to achieve optimum tax revenue in Asean countries.*

**Keywords :** *tax revenue, tax ratio, contagion effect, sunset policy*

Pajak adalah salah satu instrumen keuangan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan suatu negara. Seiring dengan itu, pajak merupakan sebuah piranti yang sering digunakan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal suatu negara. Dalam konteks ini, pengenaan pajak terkandung unsur kebijakan publik yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat, dan karenanya, implementasi dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi memegang peran sangat menentukan. Sebagai sebuah instrumen kebijakan fiskal, pajak memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Pengenaan pajak di suatu negara didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pajak merupakan pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya, Mangkoesoebroto (1998:

181). Sedangkan menurut Jones (2002:4) pajak didefinisikan sebagai : "...A tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay." Dengan demikian pajak dimaksudkan sebagai transfer masyarakat untuk ongkos pembangunan bukan sebagai hukuman atau denda karena suatu hukuman. Sebaliknya pajak merupakan suatu kewajiban, bukan pilihan.

Peran pemerintah dalam pemungutan pajak (*tax effort*) sangat menentukan untuk menjamin mengalirnya penerimaan negara yang meningkat dari waktu ke waktu. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka penerimaan pajak juga diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Besar kecilnya kapasitas pajak (*tax capacity*) mencerminkan kemampuan keuangan suatu negara dalam melaksanakan pembangunannya. Semakin besar porsi

pajak dalam penerimaan negara, menunjukkan semakin besar kemandirian negara tersebut dalam pembiayaan pembangunannya. Sebaliknya semakin kecil porsi pajak dalam penerimaan negara, maka semakin tidak mandiri kemampuan negara dalam membiayai pembangunannya.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan pajak, secara lebih khusus Connolly and Munro (1999: 158) menyadari benar bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu sangat disadari bahwa pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Pada posisi ini peran pajak sangatlah strategis dan menentukan di dalam mencapai keberhasilan dan kesinambungan pembangunan.

Kawasan perekonomian Asean memiliki dinamika tersendiri dalam pengoptimalan penerimaan negara dari pajak. Sebagai kawasan yang memiliki lokasi strategis dalam lalu lintas perhubungan via laut secara internasional, Asean menjadi pilihan utama bagi negara-negara di berbagai dunia untuk bermitra dalam kegiatan ekonomi. Kepercayaan negara-negara di luar Asean untuk bermitra dengan Asean didasarkan pada kondisi empiris, dimana Populasi negara-negara di Asean sangat besar (sekitar 500 juta). Jumlah populasi tersebut merupakan sebuah potensi pasar yang sangat besar menghadapi berbagai permintaan macam barang dan jasa. Sebagai konsekuensi, kekuatan ekonomi negara-negara Asean banyak ditopang dari permintaan domestik yang terus berkembang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Potensi populasi dan stabilitas perekonomian di kawasan Asean, menjadikan negara-negara Asean memiliki

peluang yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena stabilitas perekonomian, merupakan sebuah indikator dari berjalannya berbagai kegiatan ekonomi suatu negara. Kondisi ini akan berdampak pada perluasan dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dapat tercipta dalam pembangunan negara-negara Asean. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 1990-2009, dinamika perkembangan ekonomi Asean tidak luput dari adanya dampak *external shocks* yang terjadi di negara-negara di luar kawasan Asean. Kondisi ini tentunya juga berdampak pada stabilitas perekonomian masing-masing negara Asean. Sebagai antisipasi, tentunya masing-masing negara juga menyiapkan berbagai kebijakan dalam rangka memperkuat fundamental perekonomiannya, sehingga *external shocks* yang ada tidak berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi dan juga penerimaan pajak dalam postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara masing-masing negara Asean. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis secara deskriptif perkembangan penerimaan pajak negara-negara Asean dalam menghadapi konstelasi perekonomian global yang terjadi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif kuantitatif. Penelitian difokuskan pada 4 (empat) negara Asean, yakni ; Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand dalam kurun waktu 1990-2009. Data penelitian ini merupakan data sekunder time series, yakni data tentang penerimaan pajak di masing-masing negara anggota Asean. Sumber data dalam penelitian ini adalah *Asian Development Bank* yang dapat diakses melalui situs, [www.adb.go.id](http://www.adb.go.id). Data yang dibutuhkan diperoleh dengan teknik

dokumentasi, yakni melakukan tabulasi, pencatatan, perekaman data dan pemaparan data.

### Hasil dan Pembahasan

Perekonomian negara-negara Asean dalam kurun waktu 1990-2009 dihadapkan pada konstelasi perekonomian global yang berkembang cukup fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut negara-negara di luar kawasan Asean mengalami krisis ekonomi, seperti di USA, Uni Eropa dan Jepang. Krisis tersebut merupakan akumulasi dari berbagai ketidakstabilan yang ditimbulkan baik dari sisi keuangan negara, keuangan perusahaan dan sektor perbankan. Krisis tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan *contagion effect* ke negara-negara di kawasan Asean. Hal ini karena pada kenyataannya negara-negara Asean sudah menerapkan *open economy* dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi internasional, seperti aliran modal dan perdagangan barang dan jasa. Dalam hal ini investor asing dan kreditur yang memiliki modal tentunya menginginkan profit yang tinggi dalam bisnisnya. Pada sisi lain ekspor negara-negara berkembang mengalami tekanan ketika negara pembeli utama di luar negeri mengalami krisis. Oleh karena itu negara-negara berkembang berusaha sekuat mungkin untuk mengoptimalkan sumber keuangan dalam negerinya (Culpeper and Bhushan 2008).

Namun demikian dalam kurun waktu 1990-2009 walaupun terjadi gejolak perekonomian eksternal, perekonomian negara-negara di kawasan Asean masih menunjukkan stabilitasnya. Kondisi stabilitas perekonomian inipun pada akhirnya berdampak pada sektor penerimaan negara dari pajak. Sebagaimana diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam membangun negara. Kemandirian pembiayaan pembangunan

akan ditentukan dari kapasitas pajak yang dapat dioptimalkan oleh negara-negara Asean. Secara *agregate* dengan jumlah penduduk yang cukup besar di kawasan Asean, menjadikan negara-negara di kawasan Asean memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan perekonomian di negara-negara Asean pasca krisis ekonomi tahun 1998 ditandai oleh adanya semangat menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahannya. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, dimana penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diterapkan dengan sebuah Undang-undang dan efektif berlaku pada tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut mengisyaratkan adanya distribusi keuangan yang lebih merata ke pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

Salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Asean dewasa ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak dapat memberikan kontribusi besar dalam rangka membiayai pembangunan negara. Dalam hal ini masing-masing negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengintensifkan sumber-sumber penerimaan negara. Sebagai gambaran dari kondisi perkembangan penerimaan pajak di negara Asean dapat dipaparkan berikut ini.

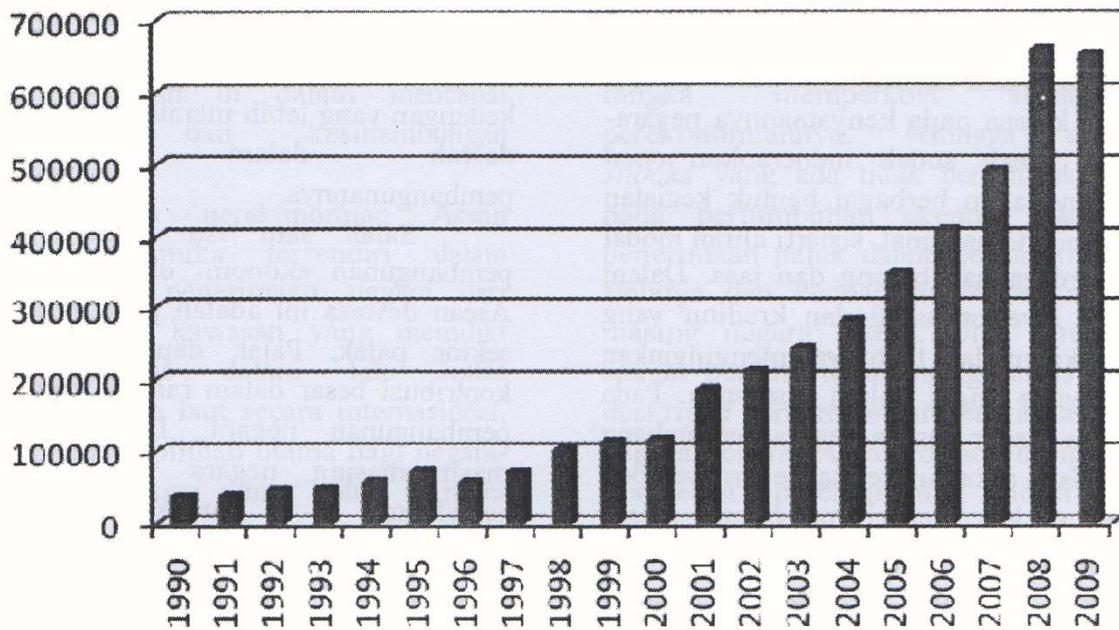
#### a. Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asean, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan pajaknya. Hal ini karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk, maka kegiatan ekonomi yang tercipta juga akan semakin besar. Hal ini tentunya dapat meningkatkan rasio

perpajakan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara Asean lain seperti Malaysia dan Singapura. Guna mencapai kinerja perpajakan yang lebih besar lagi, berbagai kebijakan telah dilontarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.03/2008). Kebijakan *Sunset Policy* ini adalah fasilitas yg diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghilangkan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Dalam kebijakan *sunset policy* tersebut terdapat dua jenis pengampunan, yaitu; penghapusan sanksi

administrasi dan terhindar resiko pemeriksaan kepada WP yang baru mendaftarkan NPWP pada tahun 2008 dan penghapusan sanksi administrasi (bukan pengurangan sanksi) terhadap WP yang melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 1998 s/d 2006 (sesuai daluarsa pajak). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.

Adapun perkembangan penerimaan negara dari pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: www.adb.org

**Gambar 1**  
**Penerimaan Pajak Di Indonesia (Miliar Rp)**

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak Indonesia dalam kurun waktu 1990-2009 menunjukkan adanya trend kenaikan. Penerimaan pajak mulai tahun 2001 mulai menunjukkan kenaikannya menjadi sebesar Rp. 185.541 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2008

penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar Rp. 658.701 miliar. Sedangkan tahun 2009 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 651.955 miliar.

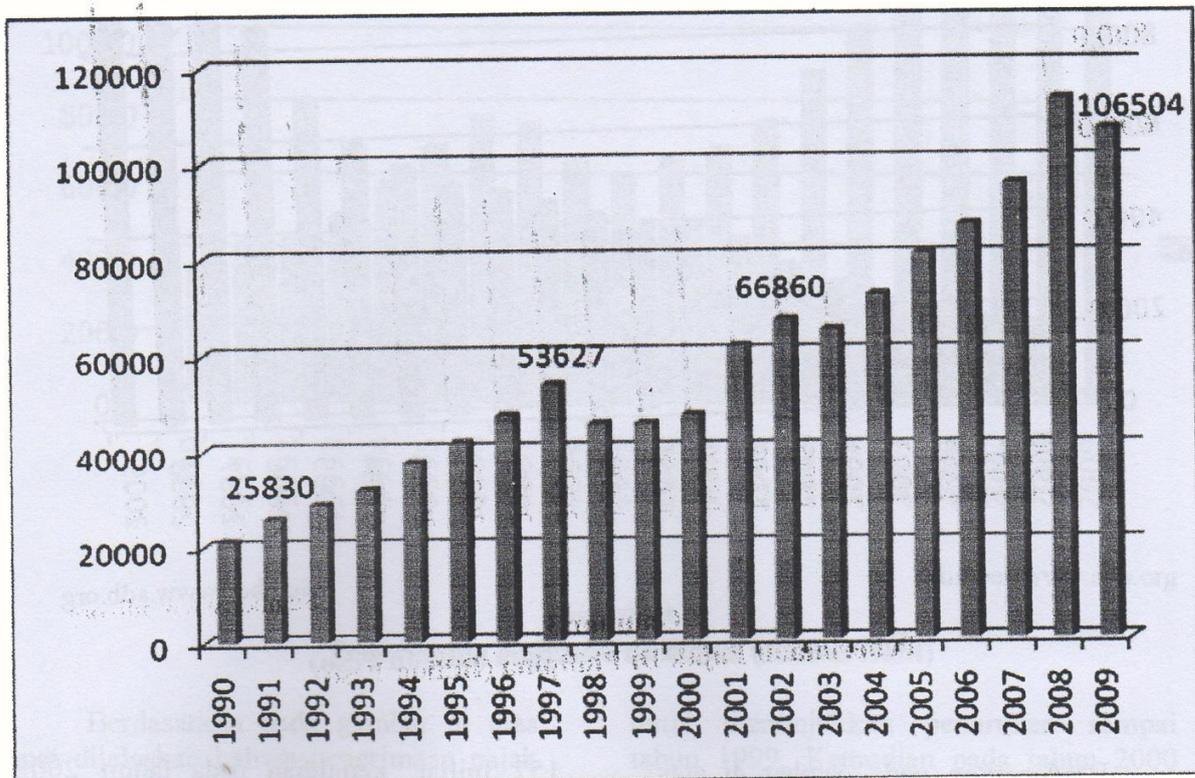
Berdasarkan pada tren angka penerimaan yang terus meningkat ini menunjukkan adanya potensi pajak yang cukup besar untuk dapat digali lagi dalam

rangka meningkatkan penerimaan negara. Hal ini tentunya dapat terjadi karena selain jumlah penduduk yang besar, kekuatan perekonomian Indonesia dewasa ini sangat ditopang oleh permintaan domestik. Dengan semakin membaiknya perekonomian nasional tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk terus melakukan kegiatan ekonominya. Dalam hal ini penerimaan pajak akan terus mengikuti kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat dalam perekonomian nasional.

#### b. Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara dengan populasi pada tahun 2009 sekitar 28 jiwa. Struktur perekonomiannya memiliki kemiripan dengan Indonesia, yang banyak ditopang oleh sektor industri manufaktur dan pertanian dalam

pembangunannya. Adapun penerimaan negara bersumber dari *indirect taxes* (dikumpulkan oleh *Royal Customs and Excise Department*), *direct taxes* (dikumpulkan oleh *the Inland Revenue Board*), dan *non tax revenue*. *Indirect taxes revenue* sejak tahun 1960 merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan negara Malaysia. *Indirect taxes revenue* terdiri dari ; *import duties, export duties, excise duties, sales tax* dan *service tax*. Dalam kaitannya dengan kebijakan pajak di Malaysia, maka keputusan pemerintah Malaysia untuk merubah sistem *indirect tax* dari pajak penjualan dan jasa ke *Good Service Tax* (GST) merupakan isu perekonomian yang menarik (Taha dan Loganathan, 2008). Adapun sebagai gambaran dari penerimaan pajak di Malaysia dapat dilihat pada gambar berikut ini :



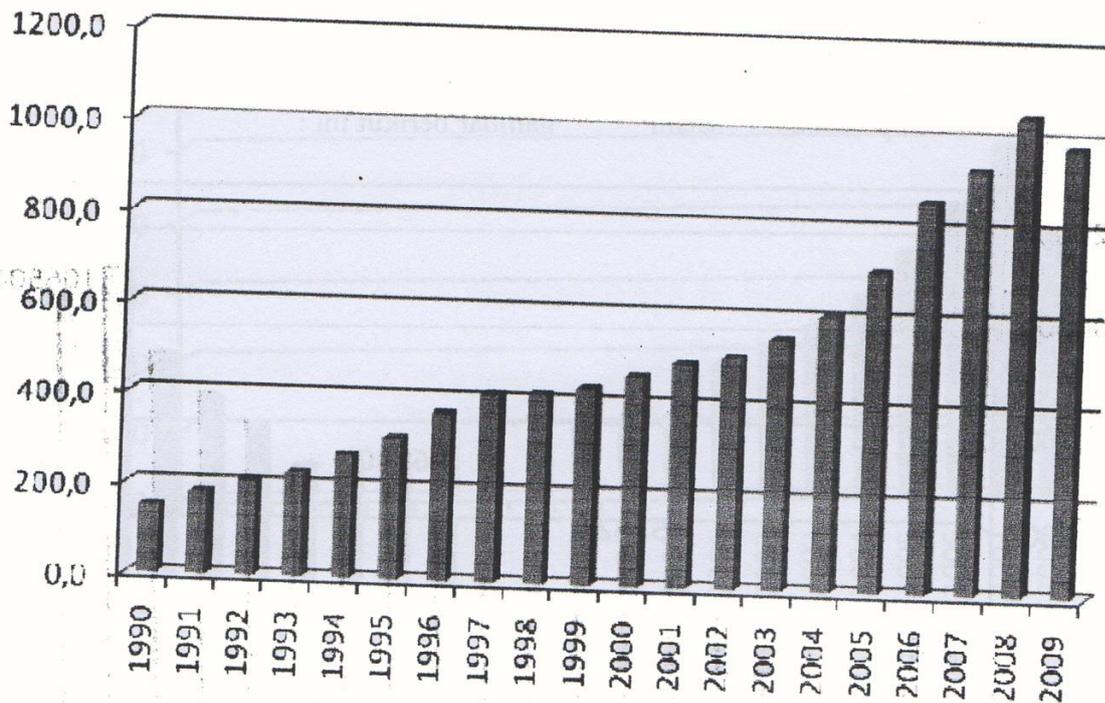
Sumber: www.adb.org

**Gambar 2**  
Penerimaan Pajak Di Malaysia (Million Ringgit Malaysia)

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Malaysia menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 1990-2009. Penerimaan pajak pada tahun 1990 sebesar RM 21.244 Juta. Angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rm 112.987 juta pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009 penerimaan pajak di Malaysia turun menjadi RM 106.504 juta. Fluktuasi dalam kenaikan pajak pada tahun 2008 dan 2009 ini sebagai dampak terjadi krisis ekonomi yang melanda perekonomian di negara-negara maju.

**c. Philipina**

Perkembangan penerimaan pajak di Philipina ditandai oleh adanya reformasi perpajakan pada tahun 1997 (*the government's Comprehensive Tax Reform Program (CTRP)*). Dalam CTRP tersebut termasuk didalamnya *additional exemptions for VAT coverage*, pengurangan *corporate income tax (CIT) rate* dari 35% to 32 %, dan menurunkan *effective tax rates* untuk tiga bentuk komoditi yakni : *alcohol products, cigarettes, dan petroleum products* dengan merubah dari *ad valorem* ke *specific taxes* (Ibon Fondation, 2010). Adapun sebagai gambaran dari penerimaan pajak di Philipina dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: www.adb.org

**Gambar 3**  
**Penerimaan Pajak Di Philipina (Billion Peso)**

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Philipina mengalami kenaikan selama kurun waktu 1990-2009. Pada tahun 1990 penerimaan pajak Philipina mencapai Peso

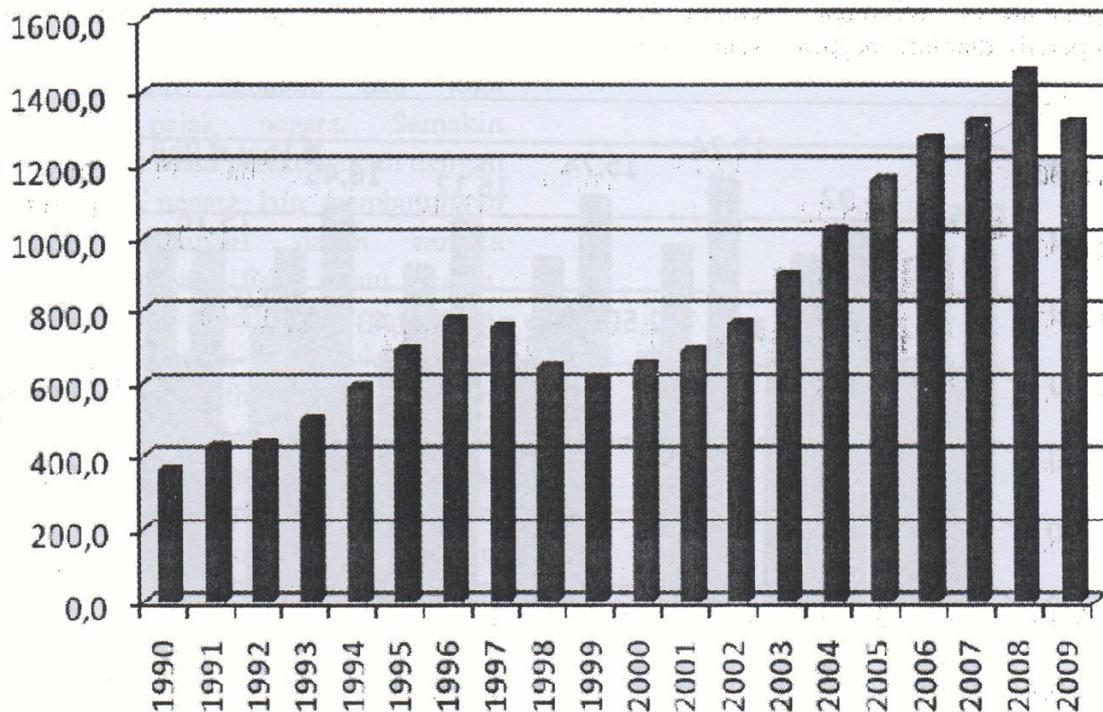
152 miliar, kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar Peso 1.049 miliar. Perkembangan penerimaan pajak di Philipina tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar Peso 982

miliar. Penurunan pajak pada tahun 2009 ini juga merupakan konsekuensi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri Philipina.

#### d. Thailand

Penerimaan negara di Thailand dapat bersumber dari *indirect tax*, *direct tax* dan *non tax revenue*. Adapun Sumber-sumber penerimaan pajak di Thailand seperti ; *income tax*, *value added tax*, *excise tax*, dan *import tax*. Namun demikian seiring dengan pemberlakuan

perjanjian perdagangan bebas seperti dalam kerangka WTO, AFTA dan FTAs, maka jenis pajak *import tax* mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 1998 hingga 2003 jenis pajak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak di Thailand adalah pajak pertambahan nilai (*value added tax*) sebesar 29% dan *excise tax* sebesar 24%. Sedangkan *corporate income tax* dan *personal income tax* masing-masing sebesar 19% dan 14% (Sujjapongse, 2005). Adapun perkembangan penerimaan pajak secara *aggregate* di Thailand sebagai berikut ini :



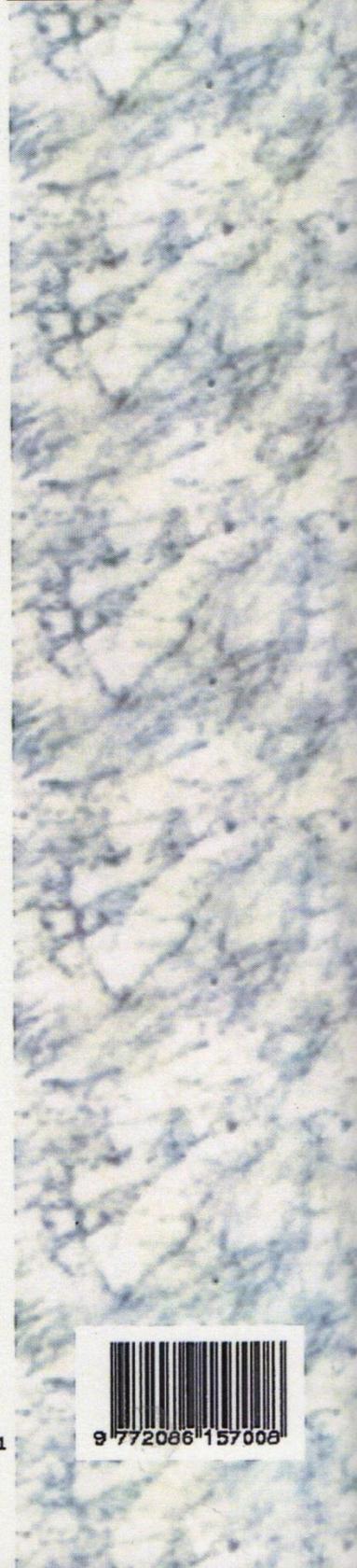
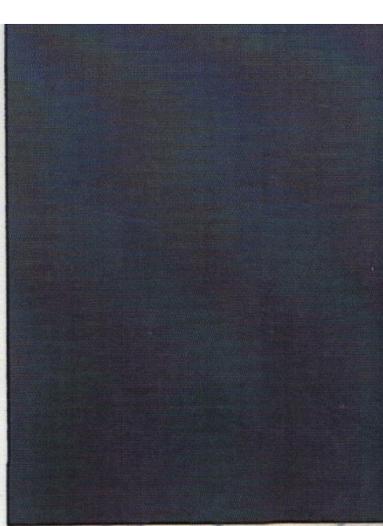
Sumber: www.adb.org

Gambar 4

#### Penerimaan Pajak Di Thailand (Billion Baht)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak di Thailand mengalami fluktuasi pada periode tahun 1990-2009. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pada tahun 1997 dan tahun 1998 dimana penerimaan pajaknya masing-masing sebesar Baht 754 Miliar dan menurun menjadi Baht 642 Miliar dan

terus menunjukkan penurunan sampai tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 penerimaan pajak mulai menunjukkan adanya kenaikan menjadi sebesar Baht 615 Miliar. Pada tahun 2008 penerimaan pajak di Thailand mengalami puncaknya, yakni sebesar Baht 1.461 Miliar. Perkembangan pada tahun 2009 penerimaan pajak



Cover design: ©Van Mit 2011



9 772086 157008